



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan I No.33 Cikokol, Tangerang – Banten, Telp: (021) 5579 3599, Website : http://fh-umt.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : KIKI DITA PERAWI OKTAVIA SARI
 NIM : 217 920 1194
 PRODI : ILMU HUKUM
 PEMBIMBING : Amiludin. SH., M.H.
 JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN PERKAP NO.2 TAHUN 2017 DENGAN UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2011 DALAM KEWENANGAN MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM.
 MULAI SKRIPSI :
 SELESAI SKRIPSI :



Menyetujui,
 Dekan

Dwi Nur Fauziah Ahmad, SH., MH
 NIDN. 0420018202

NO	TANGGAL BIMBINGAN	SARAN/PERBAIKAN	PARAF PEMBIMBING
1.	20/01/2025	Bimbingan BAB I Setiap paragraf pake Referensi	
2.	11/02/2025	Bimbingan BAB I & Lanjut BAB II	
3.	29/02/2025	Tidak ada daftar pustaka Acc untuk sidang Sempuro	
4.	06/06/2025	Perbaiki Lag: utu BAB III	
5.	09/07-2025	BAB IV Perlu ada pendahuluan peneliti	
6.	16/07-2025	form ulu referensi di BAB IV	
7.	17/07-25	Acc 5025	

Menyetujui untuk maju ke ujian munaqosah /skripsi.

Tanda tangan pembimbing Tanggal 22/07-25

Catatan:

Kartu ini diisi oleh dosen pembimbing pada saat bimbingan
 Syarat sidang munaqosah /skripsi minimal 5x bimbingan.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG
FAKULTAS HUKUM

Berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 109/0/0/2009

Jl. Perintis Kemerdekaan I No. 33 Cikokol, Tangerang - Banten WA. : 0812 7474 0221, Telp. : (021) 5579 3599, Website : <http://www.fh.umt.ac.id>

Tangerang, 14 Muharram 1447 H
09 Juli 2025 M

Nomor : 280/Prmh/III.3.AU/F/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya
Di-
Tempat

Assalamua'alaikum Wr. Wb.
Innal Hamda Lillah,

Ba'da salam, semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan untuk kita dalam melaksanakan fungsi kekhalfahan di muka bumi ini dalam kapasitas dan kewenangan masing-masing. Amin.

Sehubungan dengan tugas akhir penelitian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang atas nama:

Nama Lengkap : **KIKI DITA PRAWI OKTAVIA SARI**
NPM : 2174201144
Semester : VIII / (delapan)
Prodi : Ilmu Hukum
No. Tlp : 089636111663
Judul Skripsi : **Perbandingan Perkap No.2 Tahun 2017 Dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Dalam Kewenangan Polri Memberikan Bantuan Hukum**

Adapun keperluan yang bersangkutan yaitu izin melakukan Penelitian di kantor Bidang Hukum Polda Metro Jaya untuk keperluan Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat kiranya memberikan bahan dan data yang diperlukan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, di ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa-Fathun Qarib
Wassalamua'laikum Wr. Wb.



Dwi Nur Fauziah Ahmad, SH., MH
NIDN. 0420018202

Pertinggal.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA
BIDANG HUKUM



SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET/ / VI / DIK.2.6./2025/Bidkum

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : KIKI DITA PRAWI OKTAVIA SARI NIM 2174201144;

Fakultas/Universitas : HUKUM / UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG.

Adalah benar telah melaksanakan program penelitian di Kantor Bidang Hukum Polda Metro Jaya dalam rangka membentuk mahasiswa agar memiliki kemampuan dan kemahiran menerapkan Ilmu Hukum dan Keterampilan Hukum serta memiliki daya saing ditingkat Nasional dan Internasional.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 23 Juni 2025

KEPALA BIDANG HUKUM POLDA METRO JAYA



ABRIANTO PARDEDE, S.H., S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72100608

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian

“ Perbandingan Perkap No.2 Tahun 2017 dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Dalam Kewenangan Memberikan Bantuan Hukum”

Nama Pewawancara : Kiki Dita Prawi Oktavia Sari
NPM : 2174201144
Nama Narasumber : Fu’ad Rahmadsyah, S.H.
Instansi : Bidang Hukum Polda Metro Jaya

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana Perkap Polri dalam memberikan bantuan hukum terhadap personel polri?
2. Apakah kewenangan Polri dalam memberikan bantuan hukum tersebut bersifat atribusi langsung dari undang-undang, atau merupakan bentuk delegasi atau mandat internal?
3. Apa yang menjadi syarat dan ketentuan untuk dapat menjadi seorang pemberi bantuan hukum kepada polri yang sedang membutuhkan bantuan hukum?
4. Jika seorang Polri ingin meminta bantuan hukum apakah akan dikenakan biaya administrasi atau biaya lainnya pada saat sudah mendapatkan bantuan hukum?
5. Apakah terdapat perbedaan mekanisme bantuan hukum yang diberikan kepada anggota Polri dalam kasus pidana, perdata, dan tata usaha negara?
6. Saya pernah melihat berita terkait dengan Kerjasama antara organisasi advokat PERADI dengan Polda Metrojaya yang melakukan Kerjasama dalam melaksanakan PKPA dan UPA, apakah hal tersebut sebenarnya di perbolehkan?? Apakah tidak melanggar aturan undang-undang advokat?
7. Bagaimana pandangan Bapak terhadap sinkronisasi antara Perkap No. 2 Tahun 2017 dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?
8. Menurut Bapak, apakah terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antara bantuan hukum yang diberikan oleh Polri dan oleh lembaga bantuan hukum yang diakui dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011?

DOKUMENTASI



1.1 Foto Bersama Narasumber dari Polda Metro Jaya



KIKI DITA PRAWI OKTAVIA SARI

Alamat : Jl.Kampung Pangkalan RT.2/RW.10, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat
No. Telpn : 08963611663
Email : Kikidita21@gmail.com

PROFIL SINGKAT

Fresh graduate Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan ketertarikan pada bidang hukum, khususnya hukum perdata, pidana, dan administrasi. Memiliki pengalaman magang di DPC PERADI Tangerang selama 2 bulan, terbiasa dalam pekerjaan administratif hukum, asistensi pengacara, dan pengelolaan dokumen perkara. Mampu bekerja secara individu maupun tim, berkomunikasi dengan baik, dan berorientasi pada ketelitian serta tanggung jawab.

PENGALAMAN

Magang - Dewan Pimpinan Cabang PERADI Jakarta

Sep 2024 - Nov 2024

- Membantu administrasi dokumen hukum, termasuk penyusunan berkas pendaftaran advokat.
- Mengikuti kegiatan sidang kode etik advokat dan mempelajari prosedur peradilan.
- Mengikuti diskusi terkait permasalahan hukum dengan advokat
- Melakukan koordinasi dengan klien terkait kebutuhan administratif.

PENDIDIKAN

Universitas Muhammadiyah Tangerang

2021 - 2025 (fresh graduate)

- Jurusan S1 Hukum.
- Skripsi tentang "Perbandingan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 dengan Perkap No. 2 Tahun 2017 Dalam Kewenangan Dalam Memberikan Bantuan Hukum".

Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Jakarta

2017 - 2020

- Teknik Telekomunikasi.

KETERAMPILAN

- Teknologi: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), dasar manajemen arsip digital.
- Komunikasi: Mampu menyampaikan informasi hukum dengan jelas dan sistematis.
- Bahasa: Bahasa Indonesia (aktif) dan Bahasa Inggris (pasif – dasar akademik)